

# Mapping Muhammadiyah Islamic Boarding Schools in Central Java in Accelerating Ownership of Islamic Boarding School Statistics Numbers (NSPP)

<sup>1</sup>Ahmad Mardalis, <sup>2</sup>Liana Mangifera, <sup>3</sup>Wuryaningsih Dwi Lestari, <sup>4</sup> Saifudin,  
<sup>5</sup> Zaenal Abidin, <sup>6</sup>Nur Rizqi Febriandika, <sup>7</sup>Minhayati Saleh

<sup>1</sup>Departement of Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Departement of Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Departement of Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>4</sup> Departement of Islamic Relegion, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>5</sup> Departement of Islamic Relegion, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>6</sup> Departement of Islamic Relegion, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>7</sup> Departement of Mathematics Educations, Walisongo State Islamic University Semarang, Indonesia

✉ [email: liana.mangifera@ums.ac.id](mailto:liana.mangifera@ums.ac.id)

## **Abstract**

*The Statistical Number of Islamic Boarding Schools (NSPP) is a requirement that must be met by Islamic boarding schools to obtain assistance and services from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Of the 401 Islamic Boarding Schools in Central Java, there are currently 156 Muhammadiyah Islamic Boarding Schools, but only 42 pesantren, or 27% have NSPP. Muhammadiyah Islamic Boarding School in Central Java to obtain NSPP legality to be able to access assistance from the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The main activity of this service is to collect data on pesantren that have and do not have NSPP. Then identify the factors that hinder or hinder NSPP registration. The results of data collection from six residencies in Central Java show that the largest number of Muhammadiyah Islamic boarding schools is in the residency of Surakarta, the others are scattered in the residency of Kedu, Banyumas, Pekalongan, Semarang, and Pati. The number of Pondok Pesantren has undergone many changes, some are newly established and some are no longer active, with the total number now reaching 176 from the original 156, with the largest percentage in Indonesia, namely 41.22% of the total number of Muhammadiyah Islamic Boarding Schools in Indonesia.*

**Keywords:** NSPP, Islamic Boarding School, Muhammadiyah

## **Pemetaan Pondok Pesantren Muhammadiyah Di Jawa Tengah Dalam Percepatan Kepemilikan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)**

### **Abstrak**

Nomor Staitistik Pondok Pensantren ( NSPP) merupakan syarat yang harus dipenuhi pesantren untuk mendapatkan bantuan dan layanan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari 401 Pesantren yang berada di jawa Tengah, jumlah Pesantren Muhammadiyah saat ini 156 pesantren, namun yang memiliki NSPP hanya 42 pesantren atau 27%. Tujuan dari pengabdian ini adalah membantu Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah (LP2M) PWM Jawa Tengah dalam mendorong percepatan kepemilikan NSPP bagi pondok pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah agar bisa mendapatkan legalitas NSPP untuk bisa mengakses bantuan dari Kemenag RI. Kegiatan utama pengabdian ini adalah melakukan pendataan pesantren yang sudah dan belum memiliki NSPP. Kemudian mengidentifikasi faktor-

faktor yang menjadi kendala atau penghambat pendaftaran NSPP. Hasil Pendataan dari enam karisidenan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren Muhammadiyah terbanyak berada di karisidenan Surakarta, lainnya tersebar di karisidenan Kedu, Banyumas, Pekalongan, Semarang dan Pati. Jumlah Pondok banyak yang mengalami perubahan ada yang baru berdiri dan ada yang sudah tidak aktif lagi, dengan total jumlah sekarang mencapai 176 dari yang semula 156, dengan prosentase terbesar di Indonesia yaitu 41,22% dari jumlah Pondok pesantren Muhammadiyah di Indonesia

**Kata kunci:** NSPP, Pondok Pesantren, Muhammadiyah

## 1. Pendahuluan

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menempatkan sosok kiai sebagai tokoh sentral dan masjid sebagai pusat lembaganya (Dhofier, 1994). Terdapat lima elemen dalam pondok pesantren dimana masing-masing tidak dapat dipisahkan. Kelima elemen tersebut terdiri dari kiai/ustadz, santri, pondok, masjid, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik, atau yang sering disebut dengan kitab kuning. (Haedari, dkk, 2004:54). Aspek-aspek lain yang harus dimiliki oleh pesantren Menurut Muhtarom adalah; visi dan misi; sistem nilai; sistem pembelajaran[1]. Aspek-aspek yang saling terkait dalam sistem pembelajaran di pondok pesantren meliputi kiai, ustadz, santri, kurikulum, sumber belajar dan supervisi; (4) sarana dan media pendidikan;(5) pengelolaan dana; (6) tradisi dan simbol; (7) pengaturan kealumnian. [2]. Pesantren bisa dikatakan memiliki peran serta mencerdaskan anak bangsa karena pesantren memiliki fungsi utama yaitu santri dapat mengkaji dan menguasai ilmu agama Islam secara lebih dalam. Oleh sebab itu di dalam pesantren akan menghasilkan kader-kader ulama yang dapat melaksanakan kegiatan dakwah membawa misi penyebaran agama Islam yang dapat menjadi benteng pertahanan akhlak umat manusia yang hakiki[3].

Jumlah pondok pesantren tahun 2021 mencapai 32.736 yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Pondok pesantren ini terdiri dari tiga kelompok yaitu salafiyah, khalafiyah dan kombinasi keduanya. Keseluruhan santri kurang lebih berjumlah 1.945.230 orang putra dan 1.931.486 orang putra. Jumlah pengajar berjumlah 106.778 orang putra dan 54.105 orang putri. Sedangkan jumlah pesantren Muhammadiyah se-Indonesia yaitu 401 pesantren. Seiring perkembangan jumlah pondok pesantren di Indonesia yang semakin meningkat, Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 4804 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP). Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) diartikan sebagai kode unik bagi pondok pesantren yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang mana nomor statistik ini tidak akan sama antara satu pondok dengan pondok yang lain. Penanggung jawab penyusunan NSPP adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Kepala Seksi Pekapontren/Kependais/TOS. NSPP merupakan syarat yang harus dipenuhi pesantren untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama RI. Penerapan syarat kepemilikan NSPP bertujuan untuk memperbaiki tata kelola Pondok Pesantren secara sistematis dan terdata[4]. Disamping itu memberikan keuntungan bagi pondok pesantren untuk dapat mengakses hibah dan bantuan pemerintah bagi perkembangan Pondok pesantren.

Muhammadiyah memiliki 156 pondok pesantren di Jawa Tengah dan pondok pesantren yang memiliki NSPP baru berjumlah 42 pesantren Berdasarkan data Kementrian Agama (2020) Jumlah pesantren Muhammadiyah yang memiliki NSPP hanya sekitar 27% yaitu 42 pesantren dari jumlah pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah, sedangkan pesantren Muhammadiyah yang tidak memiliki NSPP sebanyak 114 pesantren atau 73%. Hal ini disebabkan karena pengurus pondok yang belum optimal melakukan pengurusan dokumen untuk perijinan.[5]. Pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah yang memiliki NSPP yaitu Semarang 3, Kota Surakarta 10, Banjarnegara 6, Banyumas 5, Batang 3, Blora 4, Boyolali 5, Brebes 5, Cilacap 12, Demak 2, Jepara 2, Karanganyar 7, Kebumen 5, Kendal 7, Klaten 5, Kudus 1, Magelang Kota 2, Magelang 17, Pati 1, Pekalongan 6, Pemalang 2, Purbalangga 2, Purwodadi 1, Purworejo 3, Rembang 3, Sragen 7, Sukoharjo 11, Temanggung 4, Tegal 5, Wonogiri 3, dan Wonosobo 7.

LP2M merupakan salah satu lembaga struktural di lingkungan PP Muhammadiyah yang khusus menangani pendidikan pesantren. Lembaga Pengembangan Pesantren tugas untuk menstimulus pendirian pesantren Muhammadiyah di setiap PDM serta mengembangkan dan mengkonsolidasikan pesantren-pesantren Muhammadiyah yang ada di Jawa Tengah. Melalui lembaga LP2M ini diharapkan pondok pesantren Muhammadiyah semakin berkembang dengan terdaftarnya NSPP. Di perlukan kerjasama berbagai pihak dalam meningkatkan tata kelola pondok pesantren Muhammadiyah sehingga pengembangan dakwah persyarikatan melalui pendidikan pondok Pesantren dapat tercapai.

Berdasarkan pendataan awal oleh LP2M PWM Jawa Tengah, pondok pesantren Muhammadiyah mengalami pasang surut seiring pergantian pengelola dan manajemen. Terkait kepemilikan NSPP masih banyak yang belum memilikinya dikarenakan banyak syarat administrasi yang harus dipenuhi. Mengingat di Jawa Tengah merupakan jumlah terbesar Pondok Pesantren Muhammadiyah di Indonesia, dan masih minimnya jumlah yang memiliki NSPP maka kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan percepatan pendaftaran NSPP Pondok Pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah melalui dua tahapan yaitu pendataan dan identifikasi pondok pesantren dan pendampingan percepatan pendaftaran NSPP di Jawa Tengah.

## 2. Metode

Pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan *community development* dan partisipatif karena dirasa lebih efektif. Pendekatan *community development* berorientasi kepada upaya pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan demi kepentingan mereka sendiri[6]. Pendekatan *partisipatif* yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai proses dan pelaksanaan[7]. Sasaran utama program pengabdian Pendampingan Percepatan Pendaftaran NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) Bagi Pesantren Muhammadiyah Di Jawa Tengah adalah 6 karesidenan di Jawa Tengah dengan total 101 pondok pesantren Muhammadiyah.

Penerapan ipteks dilakukan dengan pendampingan untuk memberikan pelatihan bersama mitra sasaran kepada objek pondok pesantren dalam persiapan dan prosedural pengajuan NSPP[9]. Fasilitasi dilakukan dengan pemberian bantuan berbagai prasarana dan sarana pendampingan persiapan. Konsultasi dan pendampingan dilakukan secara periodik untuk membina dan mendampingi sampai berhasil melakukan perijinan NSPP. Untuk menjamin keberlanjutan, program pengabdian pada pondok pesantren Muhammadiyah karesidenan Jawa Tengah dirancang kegiatan dalam beberapa tahapan (Gambar 1).

Pada tahapan awal dilakukan persiapan dimana tim pengusul melakukan silaturahmi ke LP2M PWM Jawa Tengah untuk berkoordinasi rencana pengabdian, Koordinasi tersebut guna untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh LP2M PWM terkait dengan jumlah pondok pesantren muhammadiyah di Jawa Tengah yang masih sedikit mendapatkan NSPP. Selanjutnya dilakukan FGD Bersama pengelola pondok pesantren Muhammadiyah dengan fasilitator tim pelaksana dengan tujuan menentukan prioritas permasalahan yang akan diselesaikan guna mempercepat pengurusan NSPP. Setelah mendapatkan wawasan dan pengetahuan, selanjutnya untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan program, dilakukan pendampingan dan pembinaan, serta dilakukan *monitoring* dan E valuasi sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 4 tahap yaitu identifikasi profil pondok, pendataan ke pondok pesantren, Sosialisasi pendampingan, dan Pendampingan pendaftaran NSPP. Karena masih dalam masa pandemi, maka semua kegiatan pengabdian dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, tidak saling berjabat tangan, menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dan memakai *hand sanitizer* (Kemenkes, 2020). Identifikasi profil dilakukan oleh tim P2DAI bersama dengan mitra LP2M PWM didapatkan hasil bahwa jumlah pondok pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah berjumlah 156 yang tersebar di kota Semarang, Kedu, Pati, Banyumas, Pekalongan dan Surakarta.

Kegiatan dilakukan dengan koordinasi melalui dua metode yaitu tatap muka langsung dengan pengelola pondok dan media *online* grup WhatsApp untuk mendata permasalahan pondok pesantren yang melibatkan mahasiswa yang membantu memfasilitasi dan menghubungi pondok-pondok Muhammadiyah Jawa Tengah untuk mengidentifikasi dokumen pengurusan ijin NSPP seperti profil pondok pesantren, Dokumen kelengkapan pendaftaran NSPP, serta permasalahan dan kendala dalam pendaftaran NSPP, sekaligus untuk mengetahui kondisi pondok pesantren terakhir sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Kunjungan Pendataan Pondok Pesantren Muhammadiyah

Dari hasil survei dan pendampingan diatas pendataan pondok pesantren yang dilakukan oleh tim P2DAI dan LP2 PWM jumlah pondok pesantren Muhammadiyah Jawa Tengah yang memiliki NSPP di setiap karesidenan sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Pendataan Pondok Pesantren Muhammadiyah Jawa Tengah

No	Karesidenan	Jumlah Pondok Pesantren data Awal	Jumlah Pondok yang aktif	Jumlah Pondok Yang tidak ada kontaknya	Jumlah Pondok Memiliki NSPP	Jumlah Pondok sedang Proses pengajuan NSPP	Jumlah Pondok Belum Memiliki NSPP	Jumlah pondok yang tidak ada respon
1	SEMARANG	12	9	2	1 (perpanjangan)	1	2	3
2	KEDU	38	19	4	-	-	11	4
3	PATI	12	6	-	-	-	6	6
4	BANYUMAS	25	17	3	2	1	11	
5	PEKALONGAN	21	17	4	1			
6	SURAKARTA	48	33	11	3	3	11	7

Sumber: Survey 2022

Perkembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah di petakan berdasarkan enam Karisidenan yang ada di Jawa Tengah, Yaitu Karisidenan Semarang, Kedu, Pekalongan, Pati, Surakarta, dan Banyumas.

#### 1) Semarang

Berdasarkan hasil pendataan pondok pesantren di Karisidenan Semarang oleh tim P2DAI selama bulan Juni-September 2022 tercatat temuan jumlah pondok pesantren sebanyak 9 Pondok pesantren yang aktif, 2 pondok pesantren tidak ada kontaknya, 1 pondok pesantren memiliki NSPP dalam proses perpanjangan, 1 pondok pesantren dalam masa pengajuan dan 2 pondok pesantren yang belum memiliki NSPP.

#### 2) Kedu

Perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Kedu berdasarkan pendataan oleh tim P2DAI mengalami pasang surut, jumlah temuan pondok pesantren sebanyak 38 dan sejumlah 24 Pondok belum memiliki NSPP. Dari 24 jumlah pondok tersebut, 19 Pondok pesantren aktif, 4 pondok pesantren tidak ada kontaknya.

#### 3) Pati

Karisidenan Pati merupakan Karisidenan yang memiliki pondok pesantren Muhammadiyah paling sedikit diantara karisidenan lainnya, dari 12 pondok pesantren Muhammadiyah yang masih aktif tinggal 6, tersebar di Kabupaten Jepara, Rembang, Lasem, dan Blora. Dari 6 pondok pesantren aktif semuanya belum memiliki NSPP.

#### 4) Pekalongan

Berdasarkan hasil kunjungan tim P2DAI ke beberapa pondok pesantren di Pekalongan diperoleh temuan jumlah pondok pesantren sebanyak 21. Dari jumlah tersebut 17 pondok pesantren aktif, dan 4 pondok pesantren tidak ada kontaknya.

#### 5) Banyumas

Berdasarkan hasil survei dan pendampingan pondok pesantren di Kabupaten Banyumas oleh tim P2DAI selama bulan Juni-Juli tercatat temuan jumlah pondok pesantren sebanyak 25. Sejumlah 17 pondok pesantren yang masih aktif, 3 pondok pesantren tidak ada kontaknya, 2 pondok pesantren memiliki NSPP, 1 pondok pesantren dalam proses pengajuan dan 11 pondok pesantren belum memiliki NSPP.

#### 6) Surakarta

Jumlah Pondok Pesantren Muhammadiyah di Karisedenan Surakarta merupakan yang terbesar di Jawa Tengah. Hasil pendataan pondok pesantren di karisedenan Surakarta oleh tim P2DAI selama bulan Juni-September 2022 tercatat temuan jumlah pondok pesantren sebanyak 48. Sejumlah 33 pondok pesantren yang masih aktif, 11 pondok pesantren tidak ada kontakannya, 3 pondok pesantren sudah memiliki NSPP, 3 pondok pesantren dalam proses pengajuan dan 11 pondok pesantren belum memiliki NSPP.

Hasil kegiatan pendataan pondok pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah dalam rangka percepatan pemilikan NSPP menunjukkan bahwa jumlah pondok Pesantren mengalami kenaikan yaitu mencapai 176 dari yang semula 156, dan yang masih aktif dan yang memiliki NSPP sejumlah 84 atau 47%, sedang dalam proses 4 atau, dan yang belum memiliki NSPP sejumlah 88 atau 50% dari total Pondok Pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan beberapa factor internal antara lain bahwa masih minimnya pondok yang memiliki kelengkapan administrasi, belum adanya pencatatan data asset pondok, pencatatan administrasi Pendidikan dan struktur manajemen kelembagaan yang belum optimal, hal ini disebabkan minimnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan pondok pesantren serta sumberdaya yang terbatas, serta dukungan finansial untuk Lembaga yang masih minim. Oleh karena itu, solusi hasil kegiatan ini menjadi program kegiatan tahapan selanjutnya dalam pendampingan percepatan pemilikan NSPP, yang meliputi Focus Grup Discussion yaitu tim mengundang perwakilan Pengelola Pondok Pesantren Muhammadiyah per karisedenan di Jawa Tengah untuk mengikuti FGD secara luring dengan tujuan menentukan prioritas permasalahan yang akan di selesaikan guna mempercepat pengurusan NSPP. Selanjutnya pengecekan Syarat Administrasi NSPP dan pendampingan Pendaftaran NSPP.

## 4. Kesimpulan

Program pengabdian pendampingan percepatan pendaftaran NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) bagi pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah telah terlaksana melalui pendataan dan pemetaan Pondok Pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil pendataan jumlah pondok pesantren yang telah memiliki NSPP dan yang belum memiliki NSPP diharapkan dapat menjadi prioritas utama yang lebih intensif dalam pendampingan kepada pondok Pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah. Tata kelola pondok pesantren menjadi tantangan dan kendala dalam pemenuhan persyaratan NSPP yang memudahkan dalam proses administrasi. Dari hal tersebut diharapkan kedepan dalam pengelolaan pondok perlu penataan dalam manajemen dan kelembagaan yang lebih profesional dan sistematis. Diharapkan dengan adanya peningkatan pemilikan NSPP bagi pondok pesantren Muhammadiyah ini menjadikan kemudahan akses terhadap dukungan dan bantuan Pemerintah untuk pengembangan Pondok. Sehingga mendukung perkembangan dan keberlanjutan Pondok Pesantren Muhammadiyah di Jawa Tengah.

## 5. Ucapan Terimakasih

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor dan Kepala LPMPP UMS yang telah memberikan fasilitas dan dukungan terhadap program pengabdian pada masyarakat ini, Pengurus pondok pesantren Muhammadiyah, LP2 PWM Jawa Tengah sebagai mitra yang telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan, seluruh mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Pandu Yogatama, Fa'idhatul Achsan Ima Rachmawati, Isnania Wi'am Murti Santosa, Muhammad Izzan Naqiba, Tomy Widiatmoko. Serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengabdian pada masyarakat ini.

## Referensi

- [1] A. Mardalis, M. A. Ahmadi, M. Shobahiya, and M. Saleh, "Identifying the Culture of the Muhammadiyah Islamic Boarding School," *Int. J. Educ. Manag. Innov.*, vol. 2, no. 3, p. 272, 2021, doi: 10.12928/ijemi.v2i3.4043.
- [2] H. Thamrin and A. Septiawan, "Model Multi Situs di Cabang Muhammadiyah Kartasura untuk Efisiensi Pengelolaan Web Berbagai Amal Usaha," *War. LPM*, vol. 20, no. 1, pp. 40–48, 2017, doi: 10.23917/warta.v19i3.3438.
- [3] U. D. Bogor and U. D. Bogor, "Program notarisasi pendirian pondok pesantren di kabupaten bogor notarisasi program in the district cottage boarding bogor," *Media Pengabd. Kpd. Masy. Qardhul Hasan*, vol. 2, no. April, pp. 29–34, 2016.
- [4] N. A. Shofiyah, H. Ali, and N. Sastraatmadja, "Model Pondok Pesantren di Era Milenial," *BELAJEA J. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 1, p. 1, 2019, doi: 10.29240/belajea.v4i1.585.
- [5] E. Abadiyah, N. Rokhmad, P. Permatasari, and N. Sholihah, "Solusi terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto," *J. Adm. Pendidik. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 157–170, 2020, doi: 10.15642/japi.2020.2.2.157-170.
- [6] A. Triyono, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Community Development Program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) Pt. Holcim Indonesia Tbk Pabrik Cilacap," *Komuniti*, vol. 6, no. 2, 2014.
- [7] R. RINALDY, S. A. NULHAQIM, and A. S. GUTAMA, "Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim)," *Pros. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, 2017, doi: 10.24198/jppm.v4i2.14344.
- [8] A. Nurjanah, "Digitalisasi Kelembagaan Pedukuhan melalui Sistem Informasi Desa di Dusun Nengahan Bantul DIY Article Info," *J. War. LPM*, vol. 24, no. 4, pp. 626–635, 2021.
- [9] L. Mangifera and Et.al, "Upaya Pemberdayaan UMKM Konveksi Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kawasan Solo Raya," *J. Abdi Psikonomi*, vol. 2, no. 1, pp. 8–17, 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---